# Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah[1]

Ernan Rustiadi[2]

## 1. Latar Belakang

Paradigma pembangunan paling mutakhir saat ini telah menunjukkan bahwa, **pertama**, kegiatan pembangunan semestinya ditujukan dan dilakukan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang memerlukan penyesuaian dengan kapasitas dan keadaan lingkungan sumberdaya alamnya. Sedangkan peranan pemerintah semakin bergeser lebih sebagai fasilitator pembangunan, penyedia infrastruktur publik, serta merancang kebijakan dan struktur insentif ke arah peningkatan produktivitas pelaku ekonomi. Dengan demikian, pendekatan pembangunan di masa sekarang dan di masa datang adalah pembangunan ekonomi yang berbasis komunitas lokal (*Local Community-Based Economy*). Pentingnya reorientasi pembangunan wilayah yang berbasis komunitas lokal semakin mengemuka akibat terjadinya berbagai kegagalan pemerintah *(government failure)* yang seringkali dampaknya lebih parah dari kegagalan pasar *(market failure)* yang selama ini sering dijadikan alasan intervensi publik oleh pemerintah. Menurut paradigma pembangunan sekarang, peran pemerintah perlu semakin dibatasi pada bidang-bidang dimana pelaku-pelaku ekonomi lainnya (swasta dan organisasi masyarakat) tidak mempunyai insentif untuk melakukannya. Peran pemerintah sebaiknya semakin didorong sebagai lembaga yang memfasilitasi komunikasi dan transfer informasi dan teknologi yang menjembatani informasi antara wilayah-wilayah maju dan yang relatif tertinggal.

**Kedua**, pendekatan pembangunan yang berbasis sumberdaya domestik (*Domestik Resource-Based Economy*). Reorientasi pendekatan pembangunan saat ini memerlukan diterapkannya pendekatan pembangunan wilayah yang berbasis sumberdaya domestik. Sumberdaya domestik yang dimaksud mencakup sumberdaya dalam pengertian yang luas mencakup sumberdaya fisik-alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan sumberdaya sosial. Dengan demikian, diperlukan suatu

[1] Makalah disampaikan kepada Staf Dinas Perikanan dalam Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (ICZPM), kerjasama PKSPL IPB dengan Departemen Kelautan dan Perikanan. 11 Agustus – 18 Oktober 2003, di Bogor.

[2] Staf Pengajar Program Studi Sumberdaya Pesisir dan Laut (SPL) dan Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaaan (PWD), Program Pascasarjana IPB.

pendekatan perencanaan pembangunan yang benar-benar didasarkan atas potensi alam domestik, sumberdaya manusia lokal, beserta hasil-hasil pembangunan lokal selama ini termasuk ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial (kelembagaan) domestik yang ada. Pendekatan ini memerlukan pengidentifikasian sektor-sektor basis *(basis sectors*) yang akan merupakan sektor-sektor pengendali *(driving forces)* kegiatan ekonomi wilayah. Untuk itu diperlukan evaluasi sumberdaya wilayah dan membandingkannya dengan wilayah-wilayah di sekelilingnya sehingga dapat teridentifikasi keunggulan-keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah. Pada dasarnya upaya pendayagunaan serta pembangunan sumberdaya domestik haruslah memperhatikan aspek ekologi, teknologi, ekonomi dan sosial wilayah. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh keserasian langkah antar pelaku-pelaku ekonomi wilayah.

Bukti dari pendekatan pembangunan dengan paradigma **kedua**, adalah bahwa "sektor" agribisnis telah membuktikan dirinya sebagai sektor ekonomi yang andal dan mampu bertahan dalam krisis, serta berperan sangat besar dalam perekonomian nasional. Sektor agribisnis dapat dijadikan sebagai *prime mover* untuk meningkatkan pendapatan riil petani dan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja dan berusaha serta pengembangan wilayah secara keseluruhan. Pengertian sektor agribisnis tidak dapat disepadankan dengan pengertian "sektor" secara formal selama ini. Sektor agribisnis mencakup rentang yang luas mencakup bidang lintas sektoral di dalam pengertian "sektor" ekonomi formal.

## 2. Permasalahan Pembangunan

Perencanaan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan suatu bentuk intervensi kelembagaan publik. Diperlukannya suatu intervensi publik didasari oleh pemikiran bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat optimal dicapai akibat terjadinya kegagalan pasar (*market failure)* akibat mekanisme pasar berlangsung secara tidak sempurna. Fenomena *market failure* dapat tumbuh sebagai akibat sistem ekonomi yang tidak dapat menyediakan produk-produk yang diperlukan atau akibat kegagalan alokasi sumberdaya. *Market failure* akan terjadi manakala berbagai eksternalitas negatif gagal direfleksikan dalam harga pasar, atau akibat adanya praktek monopoli-oligopoli, atau juga akibat kegagalan-kegagalan pemerintah. Secara teoritis, kegagalan pasar akan selalu muncul manakala kompetisi sempurna tidak

terjadi. Kegagalan pasar dapat menyebabkan kemunduran (berdampak negatif) bagi seluruh pelaku ekonomi.

Pemerintahan adalah suatu bentuk kelembagaan yang memiliki kewenangan atau hak legal sebagai perencana dan pelaksana kepentingan-kepentingan publik. Sebagai lembaga yang memiliki legalitas, lembaga pemerintah memiliki kewenangan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan publik sebagai terjemahan dari kepentingan publik. Perlunya lembaga publik juga didasari pemahaman bahwa beberapa bentuk fasilitas diyakini hanya dapat berfungsi dengan optimal jika diserahkan pada kelembagaan publik untuk menyediakannya. Kelembagaan pemerintahan dibangun secara berhirarki dengan otoritas yang berbeda. Lembaga pemerintahan berskala nasional menangani kebijakan-kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan berskala nasional, sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berskala daerah.

Bukti empiris menunjukkan telah terjadinya kegagalan pemerintah (g*overnment failure*) untuk berperan sebagaimana mestinya. *Government failure* timbul karena lembaga pemerintah yang eksistensinya dilandasi untuk mengeliminir *market failure*, ternyata menimbulkan masalah-masalah baru. Individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam lembaga pemerintah banyak yang ternyata berperilaku seperti individu-individu atau lembaga swasta pelaku ekonomi yang tidak berorientasi pada kepentingan publik tapi berorientasi pada kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Intervensi publik oleh kelembagaan pemerintah harus diusahakan untuk mendorong berjalannnya mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna hanya dapat dicapai jika ada keselarasan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap sumberdaya-sumberdaya produksi. Kelembagaan masyarakat lokal yang kuat dan stabil dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap terbentuknya mekanisme pasar, akibat adanya kesetaraan akses masyarakat. Kegagalan proses mekanisme pasar, pada gilirannya akan menimbulkan *market failure.*

Lembaga-lembaga sektoral dalam pemerintahan sering berperilaku seolah sebagai individu/lembaga swasta dengan tujuan yang berbeda dan bahkan saling bertentangan. Kelembagaan sektoral seringkali bertindak dengan pendekatan yang berbeda, tidak sinkron dan kadang antagonis satu dengan lainnya. Lembaga sektoral berskala nasional sering menempatkan dirinya sebagai suprastruktur yang

mengendalikan struktur di bawahnya. Kelembagaan pemerintahan dengan sistem terpusat seringkali tidak mampu mengikuti kompleksitas dan keragaman-keragaman yang ada di bawahnya sehingga cenderung lambat di dalam mengantisipasi perkembangan-perkembangan lokal.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pernah selama lebih dari dua dekade mampu tumbuh dengan rata-rata tumbuh 7,2 % per tahun. Sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan berhasil dipacu produktivitasnya sehingga secara nasional pernah dicapai swasembada beras pada era 1984–1987. Namun demikian, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang utama sejauh ini adalah yang bersumber dari kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam (migas, kayu, dll). Sektor industri manufaktur yang diyakini merupakan sektor yang akan membawa ke modernisasi pembangunan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara cepat ternyata terutama berkembang tanpa keterkaitan yang kokoh dengan sektor primer utama dan tidak berbasis sumberdaya alam lokal (bersifat *foot loose*). Krisis ekonomi memperjelas kerentanan pembangunan industri yang tidak berbasis sumberdaya domestik, sedangkan sektor agribisnis, termasuk agroindustri mampu tetap tumbuh. Di masa yang akan datang, pendekatan pembangunan yang didasarkan atas kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam tidak dapat lagi dipertahankan akibat semakin terbatasnya sumberdaya alam yang tidak terbarui (*unrenewable resources)* serta semakin menurunnya kapasitas produksi sumberdaya alam terbarui (*renewable resources*). Di lain pihak, selain berbasis sumberdaya alam domestik yang terbarui, pembangunan di masa datang perlu lebih menekankan pengembangan masyarakat lokal melalui upaya-upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal. Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, pemerintahan lokal yang akan memiliki kewenangan dan peranan perencana pembangunan yang lebih besar memiliki kemampuan yang lebih baik dan lebih berinisiatif dalam perencanaan pembangunan wilayah.

### 3. Pengertian Kawasan Strategis

Suatu kawasan strategis adalah suatu kawasan ekonomi yang secara potensial memiliki efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan secara lintas sektoral, lintas spasial (lintas wilayah) dan lintas pelaku. Dengan demikian, perkembangan wilayah strategis memiliki efek sentrifugal karena dapat menggerakkan secara efektif

perkembangan ekonomi sektor-sektor lainnya, perkembangan wilayah di sekitarnya serta kemampuan menggerakkan ekonomi masyarakat secara luas, dalam arti tidak terbatas ekonomi masyarakat kelas-kelas tertentu saja.

.Dalam upaya menilai potensinya yang dapat menimbulkan dampak multiplier terhadap perkembangan sektoral lainnya dan wilayah sasaran, diperlukan kajian-kajian secara seksama mengenai potensi keterkaitan (*linkages)*. Suatu kawasan dan komoditas dinilai strategis jika memiliki potensi kaitan ke belakang dan ke depan yang kuat. Ke arah belakang (*backward*) diharapkan pengembangan suatu kawasan strategis dapat menyerap tenaga kerja serta memacu pertumbuhan aktivitas-aktivitas penyedia input baik berupa produk-produk input (bahan mentah, bahan baku dan alat) maupun produk-produk jasa penunjang. Ke arah depan (*foreward)* pengembangan kawasan diharapkan berpotensi memicu berkembangnya aktivitas-aktivitas pengolahan dan pemanfaatan produk output kawasan. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan aktivitas-aktivitas pasca panen atau pasca penangkapan (aktivitas pengolahan/agroindustri hingga distribusi - pemasaran).

Dalam dimensi spasial, keterkaitan ke belakang maupun ke depan yang tumbuh terutama dengan aktivitas ekonomi wilayah yang secara geografis berlokasi di sekeliling kawasan produksi/pengangkapan sehingga pengembangan kawaswan pada dasarnya adalah suatu bentuk pengembangan wilayah sasaran, dimana sistem agribisnis merupakan salah satu *prime mover* yang signifikan. Upaya memperluas sebaran rentang aktivitas agribisnis, khususnya dengan menumbuhkan kegiatan-kegiatan *off-farm,* berupa pengolahan produk primer dapat dipandang sebagai upaya pemberdayaan komunitas kawasan (*community empowerment)* karena dapat memperkokoh posisi tawar pelaku-pelaku ekonomi lokal. Untuk itu di dalam perencanaan kawasan sangat diperlukan pemahaman mengenai struktur keterkaitan spasial antara kawasan pesisir dimaksud dengan wilayah lainnya/sekelilingnya.

**4. Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis/Andalan**

Secara alamiah kawasan pesisir pada dasarnya bukan semata-mata merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan laut. Kawasan pesisir merupakan tempat pendaratan ikan serta berbagai sumberdaya laut maupun aliran sumberdaya lainnya untuk kemudian dialirkan ke daratan. Dari arah daratan mengalir sumberdaya

untuk disalurkan via lautan (dan juga udara) melalui kawasan-kawasan pesisir. Akibatnya, kawasan pesisir secara global telah cenderung menjadi konsentrasi aktifitas perekonomian dan peradaban manusia. Kawasan pesisir dalam kenyataannya menampung sekitar 60% populasi dunia. Secara historis, kawasan pesisir telah menjadi hamparan konsentrasi berbagai kota-kota pelabuhan dan pusat-pusat pertumbuhan global.

Dalam kacamata ekonomi wilayah, berbagai kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki *locational rent* yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh rent lokasi (*locational rent*), setidak-tidaknya juga mengandung tiga unsur *economic rent* lainnya, yakni: *ricardian rent, environmental rent dan social rent*. *Ricardian rent* adalah *rent* berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki unruk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (*suitability*) untuk berbagai aktifitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. *Environmental rent* kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawsaan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan *social rent* menyangkut manfaat kawasan menyangkut berbagai fungsi sosial. Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan berbagai kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu.

Di dalam mekanisme pasar, pada umumnya hanya *locational dan ricardian rent* yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapatkan penilaian yang semestinya.

Di dalam struktur pembangunan daerah, suatu kawasan pesisir dinilai strategis secara ekonomi jika memiliki potensi sentrifugal di dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Dalam pengertian, dinamika perkembangannya sangat menentukan pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya, menentukan pertumbuhan wilayah-wilayah di sekelilingnya secara lintas pelaku (tidak sebatas kehidupan ekonomi kelompok masyarakat tertentu). Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

(1) Basis ekonomi (*economic base*) wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbarui (*domestic renewable resources*). Aktifitas

wilayah berbasis bukan sumberdaya domestik (*foot loose*) akan cenderung tidak stabil, rentan dan sangat tergantung pada dinamika eksternal. Sedangkan tumpuan pada sumberdaya tak terbarui (*non renewable resources*) tidak menjamin pembangunan yang *sustainable* seiring dengan berkurangnya sumberdaya (*depletion*) yang menjadi tumpuannya.

(2) Memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan *(forward linkage*) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan, sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perkembangan sektor-sektor lainnya di daerah yang bersangkutan. Tingkat *backward linkage*, (keterkaitan dengan sektor-sektor penunjang sektor basis) dan *forward linkage* (keterkaitan dengan sektor-sektor pengolah, jasa dan sebagainya yang memanfaatkan output sektor basis) yang lebih rendah dari potensi yang dimiliki daerah menciptakan kebocoran wilayah (*regional leakages*). Akibatnya, potensi pertumbuhan yang dimiliki akan "dinikmati" oleh wilayah lainnya, walaupun wilayah lain tersebut memiliki keunggulan komparatif yang lebih rendah namun memiliki keunggulan kompetitif akibat berbagai fasilitas dan struktur kebijakan (struktur insentif) yang lebih baik. Kebocoran wilayah di sentra-sentra produksi ikan di kawasan pesisir juga banyak bersumber dari proses penyusutan (secara kuantitas dan kualitas) yang pada semestinya. Tidak berkembangnya industri-industri penunjang dan pengolahan hasil tangkapan/budidaya ikan di sentra-sentra produksi ikan menyebabkan berbagai wilayah pesisir mengalami kebocoran wilayah yang sangat masif.

(3) Efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah. Keterkaitan yang signifikan dengan aktifitas ekonomi masyarakat hanya dapat terjamin pada struktur usaha yang terhindar dari bentuk-bentuk monopoli-oligopoli ataupun dari struktur pasar yang monopsoni-oligopsoni. Struktur pajak/retribusi yang tidak tepat serta berbagai bentuk *misleading policy* yang sekilas nampak ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor yang secara kuantitas sangat besar namun sebenarnya memiliki tingkat *rent* yang rendah pada gilirannya malah akan menurunkan daya kompetisi wilayah (*regional competitive*

*advantage*) dan secara jangka menengah dan panjang akhirnya malah akan meurunkan PAD. Struktur kebijakan (struktur insentif) harus diarahkan agar mendorong daya kompetitif dan menjamin multiplier yang tinggi terhadap penyediaan lapangan kerja dn penerimaan rumah tangga (bukan hanya penerimaan sektor usaha).

(4) Keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi (*intra and inter-regional interactions*) akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian (*uncertainty*). Untuk itu sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informasi yang umumnya merupakan sektor-sektor publik dimana sektor non-pemerintah masih belum memiliki insentif atau kapasitas, perlu dikembangkan.

(5) Terjadinya *learning process* secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan. Proses ini harus terus dikembangkan melalui berbagai bentuk proses dialog dan networking lintas stakeholders sebagai bentuk pengembangan *social capital*, disamping pengembangan *human, natural and man-made capitals.*

**5. Peningkatan PAD, Pertumbuhan PDRB dan Pembangunan Daerah**

Diundangkannya UU No. 22/1999 mengenai Otonomi Daerah telah mengisyaratkan semakin otonomnya peranan Pemerintahan Daerah di dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kebijaksanaan pembangunan yang sentralistik dan tidak sesuai dengan sifat keragaman ekosistem dan budaya semakin bergeser ke pendekatan paradigma pembangunan yang baru yang lebih bersifat lokal. Otonomisasi sekaligus dapat dipandang sebagai semakin terbukanya peluang perencanaan pembangunan terpadu yang lebih berbasis "wilayah", dalam arti keterpaduan sistem wilayah akan menjadi lebih dominan dibanding sistem pembangunan dengan pendekatan yang lebih menekankan pendekatan sektoral.

Keterbatasan dana pembangunan dari "pusat" telah mengharuskan pemerintahan daerah meningkatkan sumber-sumber penerimaan pemerintahan daerah. Di sisi lain, sektor perikanan dan kelautan banyak dipandang sebagai salah satu alternatif "*sources of growth*" yang menjanjikan karena selama ini dianggap belum banyak dikembangkan secara optimal karena secara potensial dianggap masih memiliki peluang pengembangan yang sangat besar. Harapan sektor perikanan dan kelautan

dijadikan sektor yang dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan PAD telah sering diterjemahkan dengan peningkatan retribusi komoditas-komoditas perikanan dan kelautan. Namun sebagaimana dijelaskan pada diatas, penerapan kebijakan *resource rent tax* yang tidak tepat pada gilirannya akan menurunkan daya kompetitif sektor tersebut di dalam pembangunan daerah. Sebaliknya, "sinyal" kebijakan mengembankan yang tepat dapat meningkatkan daya kompetisi dan berbagai dampak ganda (*multiplier*) pembangunan secara lintas sektor, lintas regional dan lintas pelaku, yang pada gilirannya justru akan meningkatkan sumber-sumber pendapatan pemerintah secara lebih sustainable.

Di lain pihak, perkembangan sektor-sektor yang berbasis pada sumberdaya-sumberdaya pesisir dan laut sering diidentifikasikan secara tidak tepat. Hingga batas tertentu, indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mencerminkan magnitude perkembangan sektor-sektor yang pembangunan. Namun sangatlah penting untuk difahami berbagai kelemahan prinsip-prinsip penghitungan PDRB (seperti tidak tertangkapnya nilai barang dan jasa di luar transaksa pasar, tidak tertangkapnya perbedaan *earned* dan *unearned income*, tidak terpilahnya nilai barang dan jasa yang benar benar menjadi penerimaan regional dan tidak, dan sebagainya) telah menciptakan berbagai *under-estimate maupun over estimate*, yang pada gilirannya dapat memberikan sinyal-sinyal informasi yang tidak tepat yang akhirnya menimbulkan kesalahan penyusunan *kebijakan (misleading policy*).

Tujuan pembangunan daerah pesisir sebagaimana halnya pembangunan sekala makro seyogyanya tidak direduksi menjadi tujuan-tujuan mengejar pertumbuhan atau penerimaan pemerintah daerah (PAD). Pembangunan daerah memiliki dimensi yang sangat luas, yang secara umum dapat dipilah atas tiga tujuan besar, yakni (1) pertumbuhan/efisiensi, (2) pemerataan/sosial dan (3) ekosistem/lingkungan. Ketiganya memiliki keterkaitan yang erat dan tidak saling terpisahkan. Kegagalan pencapaian satu tujuan dapat menggagalkan pencapaian tujaun lainnya secara timbal balik.

## 6. Penutup

Dalam makalah ini telah diuraikan secara selintas mengenai berbagai kecenderungan paradigma-paradigma pembangunan, serta implikasinya terhadap pengembangan wilayah pesisir di era ditetapkannya otonomi daerah. Walaupun

wilayah pesisir pada umumnya memiliki potensi strategis untuk menjadi prime mover pembangunan daerah, namun tidak terpenuhinya berbagai prasyarat strategisnya menyebabkan tidak signifikannya peranan sektor-sektor pembangunan berbasis pesisir dan laut terhadap pembangunan daerah

Mengingat sifatnya yang menuntut adanya keterpaduan sektoral dan spasial, pengembangan kawasan pesisir memerlukan pendekatan dan inovasi-inovasi kelembagaan. Sistem kelembagaan yang dimaksud diharapkan dapat memadukan keterkaitan sektoral, mencakup sistem manajeman pemerintahan, sistem keterpaduan bisnis antar sektor dan transformasi struktural ketenagakerjaan. Keterpaduan sektoral di dalam kerangka pembangunan wilayah memerlukan reorientasi kelembagaan-kelembagaan sektoral sehingga mampu menjadi komponen-komponen sistem pembangunan wilayah yang efektif. Inovasi kelembagaan juga mencakup sistem kelembagaan yang mendorong partisipasi komunitas lokal serta reorientasi kelembagaan-kelembagaan pemerintah. Lembaga pemerintahan seyogyanya lebih diarahkan untuk menjadi lembaga yang lebih berorientasi sebagai fasilitator dan stimulator pembangunan. Sedangkan komunitas masyarakat perlu di dorong partisipasinya dalam perencanaan-perencanaan dan proses pengembangan daerah.